



Tinjauan Kritis Terhadap Konsep Agama Sebagai Institusi Sosial dalam Ide Moderasi di Indonesia

Marianus Rago Kristeno¹, Teresia Noiman Derung²

STP-IPI Malang

Email: marianragokrist@gmail.com

Abstract

Religion has an important role in the lives of Indonesian society as a social institution that functions to maintain social stability. Amidst the diversity of cultures, languages, traditions and religions, conflict and intolerance often arise as challenges to the role of religion in society. Conflict situations that occur due to differences in religious views or understanding often become obstacles to carrying out the role of religion as a social institution. This research aims to examine the concept of religious moderation as an effort to overcome social conflict and discrimination in relation to the role of religion as a social institution. Using qualitative descriptive methods and literature study techniques, this research analyzes themes related to religious moderation and the role of religion from various literary sources so that conclusions can be drawn regarding the role of religion which tries to carry out its function through religious moderation in Indonesia. The research results show that although religion, which is a community belief system, has a significant role in instilling social values, rigid traditional views often hinder inclusiveness and tolerance. This traditional view hinders the implementation of religious moderation which aims to create social harmony, so that religion as a social institution cannot carry out its role. Therefore, the concept of religious moderation needs to be developed as an implementation of the role of religion so that society can live in peace.

Keywords: Critical Review; Religion; Religious Moderation; Social Institutions.

Abstrak

Agama memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai institusi sosial yang berfungsi menjaga stabilitas sosial. Di tengah keberagaman budaya, bahasa, tradisi, dan agama, konflik dan intoleransi sering muncul sebagai tantangan bagi peran agama dalam masyarakat. Situasi konflik yang terjadi akibat perbedaan pandangan atau paham agama sering kali menjadi hambatan untuk melaksanakan peran agama sebagai sebuah institusi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep moderasi beragama sebagai upaya mengatasi konflik sosial dan diskriminasi dalam kaitannya dengan peran agama sebagai institusi sosial. Dengan metode deskriptif kualitatif dan teknik studi literatur, penelitian ini menganalisis tema-tema terkait moderasi beragama dan peran agama dari berbagai sumber literatur sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai peran agama yang berusaha melaksanakan fungsinya melalui moderasi beragama di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun agama yang merupakan suatu sistem kepercayaan masyarakat memiliki peran signifikan dalam menanamkan nilai sosial, pandangan tradisional yang kaku sering menghambat inklusivitas dan toleransi. Pandangan tradisional ini menghambat implementasi moderasi beragama yang bertujuan menciptakan kerukunan sosial, sehingga agama sebagai institusi sosial tidak dapat menjalankan perannya. Oleh karena itu, konsep moderasi beragama perlu dikembangkan sebagai pelaksanaan peran agama agar masyarakat dapat hidup dalam kedamaian.

Kata kunci: Agama; Institusi Sosial; Moderasi Beragama; Tinjauan Kritis.

Pendahuluan

Agama menjadi suatu hal yang krusial bagi masyarakat di Indonesia. Hal ini disebabkan karena agama memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam segi spiritual agar manusia mampu menemukan tujuan, makna, dan kedamaian hati (Zandro, 2024). Agama juga menjadi salah satu institusi sosial tertua dan paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Institusi sosial sendiri dipahami sebagai bagian struktural dari masyarakat yang bertugas untuk memenuhi salah satu atau lebih kebutuhan dari masyarakat tersebut sehingga dalam jangka panjang masyarakat itu bisa bertahan. Sebagai sistem kepercayaan yang terorganisir, agama tidak hanya membentuk identitas spiritual individu, tetapi juga mengatur norma, nilai, dan aturan sosial dalam masyarakat. Di banyak negara, agama berperan penting dalam menciptakan struktur sosial yang kohesif. Di Indonesia sendiri, terdapat enam agama yang diakui negara, yaitu Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Islam, dan Konghuchu. Selain keenam agama tersebut, masih ada lagi aliran-aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Agama dan kepercayaan itu hanyalah sebagian kecil dari kemajemukan yang ada di Indonesia. Hal itu tidak terlepas dengan situasi Indonesia yang heterogen.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajemukan di Indonesia memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Indonesia yang terdiri dari banyak pulau yang diisi oleh budaya, bahasa, tradisi, dan agama yang beragam sangat berperan dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia. Keberagaman yang terjadi ini bukanlah pilihan dari bangsa Indonesia dan diyakini sebagai takdir bangsa Indonesia (Wajnah, 2023). Indonesia patut berbangga karena keragaman yang ada menjadikan Indonesia kaya, bukan saja dari segi sumber daya alamnya tetapi juga dari segi keragaman sosial yang ada.

Patut diakui bahwa keragaman yang ada di Indonesia selain memberikan keindahan, tetapi juga sekaligus menjadi tantangan bagi masyarakat. Keragaman kerap kali menjadi salah satu pemicu konflik sosial di tengah masyarakat (Suftratman, 2022). Salah satu konflik sosial yang paling marak di Indonesia adalah konflik yang berkaitan dengan perbedaan agama (Walad et al., 2024). Konflik yang mengatasnamakan agama menjadi salah satu konflik yang kompleks karena akan berdampak pada bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini sering terjadi sebagai akibat dari perbedaan keyakinan dan sudut pandang di antara masyarakat yang juga menganut agama dan budaya yang berbeda (Hidayat & Sugiarto, 2020). Agama juga sering kali dianggap menjadi sumber ketegangan ketika pemahaman terhadap ajarannya diterjemahkan secara ekstrem atau eksklusif (Saat, 2016). Faktor penyebab utama hal tersebut adalah sikap radikalisme masyarakat penganut agama yang memahami dan menerapkan ajaran agama secara ekstrem dan kaku, serta memandang ajaran agama yang lain sebagai ajaran yang sesat (Mudjijo & Jumilah, 2016)

Terdapat banyak usaha yang dilakukan untuk memediasi dan meminimalisasi potensi konflik antaragama di Indonesia, salah satunya dengan moderasi beragama. Moderasi beragama merujuk pada sikap beragama yang tidak ekstrem, terbuka terhadap perbedaan, dan mengedepankan nilai-nilai toleransi. Dalam konteks sosial yang beragam, moderasi beragama dianggap sebagai solusi untuk mencegah konflik yang berbasis agama dan menjaga harmoni sosial. Moderasi beragama, sebagai pendekatan yang menekankan sikap terbuka, toleransi, dan penolakan terhadap ekstremisme, dipandang sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dari pemahaman agama yang terlalu dogmatis (Wajnah, 2023). Moderasi ini tidak hanya dibutuhkan dalam menjaga hubungan antarumat beragama, tetapi juga dalam menjaga integritas internal komunitas agama itu sendiri. Hal ini menjadikan moderasi beragama sebagai sebuah konsep yang mendesak untuk dibahas, terutama dalam konteks dunia yang semakin global dan plural.

Di tengah kompleksitas hubungan sosial-politik dan budaya yang dipengaruhi oleh agama, konsep moderasi beragama hadir sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara keyakinan individu dan kebutuhan hidup berdampingan secara damai. Sikap moderat menjadi sikap sangat penting untuk menumbuhkan nilai-nilai toleransi dan penghormatan

terhadap orang lain. Pelaksanaan empat pilar moderasi yang meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, sikap anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal, menjadi indikator sikap moderasi beragama di Indonesia (Nurrohmah et al., 2022). Menurut Kurniawati dan Mujahid (Kurniawati & Mujahid, 2024), moderasi beragama wajib diwujudkan agar tercipta kerukunan antarumat beragama dan keyakinan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Simanjuntak (Simanjuntak, 2023), diungkapkan bahwa moderasi beragama menjadi salah satu jawaban untuk mengatasi konflik, sikap intoleransi, dan diskriminasi di Indonesia. Meski demikian, tidak semua institusi agama mampu dengan mudah beradaptasi dengan tuntutan moderasi ini. Sebagai institusi sosial yang sering kali terstruktur secara hierarkis dan dogmatis, agama sering kali menghadapi tantangan dalam berperan sebagai jembatan moderasi.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa peran agama sebagai institusi sosial membawa tantangan tersendiri. Sebagai institusi, agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku individu dan kelompok. Pengaruh ini bisa positif, seperti dalam hal mempromosikan solidaritas sosial dan keadilan. Hal ini tidak terlepas dari peran agama dalam membantu stabilitas sosial masyarakat (Irawan, 2022). Di sisi lain, pengaruh agama juga bisa menjadi negatif ketika agama digunakan untuk memobilisasi massa dalam konflik atau diskriminasi. Dalam konteks inilah kajian kritis terhadap moderasi beragama perlu dilakukan, untuk memahami bagaimana konsep ini dapat diterapkan secara efektif dalam konteks agama sebagai institusi sosial. Maka dari itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep moderasi beragama diterapkan dalam hubungan dengan peran agama sebagai institusi sosial? Apa yang menjadi tantangan dalam menerapkan moderasi beragama?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis konsep moderasi beragama dengan menempatkan agama sebagai institusi sosial yang dinamis. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mempromosikan moderasi beragama, sehingga agama tidak hanya menjadi sumber identitas spiritual, tetapi juga menjadi kekuatan positif dalam membangun masyarakat yang adil dan damai.

Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Menurut Darmalaksana (Darmalaksana, 2019), metode penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode penelitian yang memberikan penjelasan mendalam tentang suatu masalah dalam penelitian berdasarkan teori dan data-data yang diperoleh. Sementara studi pustaka, merupakan atau teknik pengumpulan data yang menggunakan sumber-sumber literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam suatu penelitian (Ardiansyah et al., 2023). Dalam penulisan artikel ini, penulis mengumpulkan data-data dari berbagai sumber literatur lain yang relevan, seperti artikel ilmiah, buku-buku, dan halaman *website*. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis dengan melihat tema-tema pokok yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Kritik Terhadap Pandangan Tradisional Agama

Kritik terhadap agama sebenarnya telah diungkapkan oleh Karl Marx yang terkenal dengan teori konflik sosial-nya. Marx mengidentifikasikan agama sebagai suatu candu yang menjadi legitimasi simbolik kaum penguasa dan menjadi penghibur bagi kaum miskin (Yewangoe, 2009). Agama dianggap memberikan legitimasi atas penderitaan dan kesengsaraan di dunia ini. Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak jarang digunakan sebagai alat untuk “menindas” kelompok tertentu. Dalam konteks moderasi beragama di Indonesia, kritik terhadap pandangan tradisional agama penting untuk dipahami, mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi masyarakat yang semakin pluralistik dan kompleks. Pandangan tradisional agama umumnya merujuk pada interpretasi literal terhadap teks suci

dan mempertahankan praktik-praktik yang cenderung kaku. Meskipun pendekatan ini berguna dalam menjaga kemurnian ajaran, pada kenyataannya ia kerap dianggap kurang fleksibel dalam merespons perubahan sosial. Hal ini membuat moderasi beragama hadir sebagai bentuk kritik terhadap pendekatan yang dogmatis, sekaligus menawarkan penafsiran yang lebih kontekstual agar ajaran agama tetap relevan di tengah masyarakat yang terus berkembang.

Beberapa kritik utama terhadap pandangan tradisional agama menyebutkan bahwa sikap yang terlalu literal dan tidak responsif terhadap perkembangan zaman dapat menciptakan jarak antara agama dan masyarakat (Siswadi et al., 2024). Banyak aliran konservatif berpegang pada ajaran yang kurang relevan dengan konteks sosial modern, seperti nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan toleransi antarumat. Sikap konservatif ini, yang kerap enggan membuka ruang dialog, sering kali mendorong kelompok untuk mengisolasi diri, yang pada akhirnya memicu eksklusivitas dan intoleransi. Bahkan, tidak jarang pandangan yang terlalu konservatif dan radikal menimbulkan sikap intoleransi yang berujung pada perundungan, kekerasan fisik, dan penganiayaan (Khoirunnissa & Syahidin, 2022). Sikap moderat, di sisi lain, menciptakan ruang bagi penafsiran yang lebih dinamis, yang memungkinkan agama menyesuaikan diri tanpa kehilangan nilai intinya.

Moderasi beragama juga menawarkan cara untuk menjembatani perbedaan dengan menciptakan pemahaman yang lebih inklusif terhadap agama sebagai institusi sosial yang dinamis. Sikap moderat mengajarkan pentingnya dialog lintas kepercayaan dan nilai-nilai inklusif dalam menjalani kehidupan beragama. Hal ini membantu mengurangi isolasi yang terjadi pada kelompok tertentu, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, dan mendorong pemahaman antaragama. Sebaliknya, pendekatan konservatif yang enggan mengakomodasi realitas sosial terkini justru memperkuat eksklusivitas, yang pada akhirnya dapat memicu ketegangan sosial.

Di Indonesia, moderasi beragama menjadi penting karena diharapkan dapat menjawab tantangan keberagaman yang ada. Sikap moderat memungkinkan reinterpretasi ajaran tanpa harus menghilangkan esensi dasar agama. Dengan cara ini, agama tidak hanya berfungsi sebagai panduan spiritual tetapi juga mampu menjadi perekat sosial di tengah perbedaan. Penelitian menyoroti bahwa sikap moderat membuka ruang penafsiran yang lebih kontekstual dan dinamis terhadap ajaran agama, sehingga dapat lebih relevan dengan tantangan sosial kontemporer yang dihadapi masyarakat modern (Sufatman, 2022).

Dalam pandangan tradisional, agama sering kali dipandang sebagai pedoman yang tidak boleh berubah dan harus diterapkan secara ketat dalam berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain, kritik dari moderasi beragama berargumen bahwa penerapan aturan agama secara kaku dalam ranah publik pada masyarakat yang plural justru dapat memicu ketegangan antarumat (Armawi, 2020). Sikap moderat berusaha memisahkan nilai-nilai pribadi dari norma publik yang berlaku umum, sehingga agama dapat menjadi landasan moral tanpa harus memaksakan aturan eksklusif yang dapat menghambat kerukunan sosial.

Pandangan tradisional agama juga sering kali dinilai kurang inklusif terhadap pandangan agama lain atau kelompok minoritas. Beberapa oknum bahkan memandang dan mengklaim bahwa ajaran agamanyalah yang paling benar di antara ajaran agama yang lain. Hal ini menjadi salah satu pemicu ketegangan dan perselisihan (Sufatman, 2022). Misalnya, di beberapa komunitas yang sangat religius, ada kecenderungan untuk mempertanyakan atau bahkan menolak legitimasi kelompok agama lain. Ini berpotensi menimbulkan prasangka dan ketidakadilan. Tentu hal ini bertentangan dengan yang diungkapkan oleh Hendropuspito (Putra, 2020), yang mengungkapkan bahwa agama berfungsi untuk mendidik, memupuk persaudaraan, melakukan kontrol sosial, dan menyediakan penyelamatan spiritual. Dalam beberapa kasus, pandangan religius yang terlalu fanatik membawa para pengikutnya pada tindakan kekerasan fisik sampai pada pembunuhan terhadap seseorang atau kelompok lain yang tidak sepaham dengannya (Khoirunnissa & Syahidin, 2022). Moderasi beragama, dengan pendekatan yang lebih terbuka,

memungkinkan individu dari latar belakang agama yang berbeda untuk hidup berdampingan secara harmonis, menciptakan ruang inklusif yang memperkuat kohesi sosial.

Namun, bagi sebagian kalangan tradisional, moderasi beragama dapat dianggap melemahkan otoritas agama. Mereka berpendapat bahwa pendekatan ini dapat mengurangi integritas ajaran agama, karena moderasi beragama lebih menekankan pada toleransi dan adaptasi. Kelompok ini khawatir bahwa kompromi yang berlebihan terhadap ajaran inti agama akan membuat agama kehilangan arah dan keasliannya. Keadaan semacam ini menjadi semacam pembuktian terhadap teori Karl Marx mengenai agama yang dianggap sebagai candu dalam masyarakat dan menjadi legitimasi terhadap kekuasaan kelompok-kelompok tertentu. Hal ini menggarisbawahi tantangan moderasi beragama dalam menghadapi kritik dari kalangan yang menganggap perubahan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai agama.

Di tengah berbagai kritik tersebut, moderasi beragama berusaha menjadi jembatan yang mengharmoniskan nilai-nilai agama dengan tuntutan masyarakat modern. Dalam masyarakat Indonesia yang beragam, moderasi beragama diharapkan mampu menciptakan ruang dialog yang sehat antara kaum tradisional dan progresif, sebagaimana yang diungkapkan dalam teori Emile Durkheim tentang agama yang mampu mempererat semangat persaudaraan (Siagian et al., 2023). Dengan begitu, perbedaan pandangan tidak akan menjadi pemicu konflik tetapi justru memperkaya pemahaman bersama dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman.

Secara keseluruhan, kritik terhadap pandangan tradisional agama dalam konteks moderasi beragama muncul sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan menjaga keseimbangan antara nilai religius dan dinamika sosial kontemporer. Pendekatan moderat ini membuka peluang untuk reinterpretasi ajaran tanpa harus mengorbankan nilai-nilai intinya, sehingga agama tetap relevan dan mampu berkontribusi positif dalam kehidupan sosial. Di Indonesia, moderasi beragama menjadi instrumen penting untuk menjaga harmoni dan stabilitas masyarakat yang plural, sekaligus memperkuat kohesi sosial tanpa kehilangan jati diri keagamaan masing-masing individu.

Agama Sebagai Institusi Sosial

Agama sering kali dipahami sebagai suatu sistem kepercayaan terhadap kekuatan supernatural (Raho, 2019). Bernard Raho (Raho, 2019) dalam bukunya yang berjudul "Sosiologi Agama", mengungkapkan bahwa Agama merupakan salah satu institusi sosial dalam masyarakat dan menjadi salah satu pokok dalam studi sosiologi. Sementara Emile Durkheim mendefinisikan agama sebagai suatu sistem kepercayaan dengan perilaku-perilaku yang utuh dan selalu dikaitkan dengan yang Sakral (Pals, 2024). Perilaku-perilaku tersebut berhubungan dengan tindakan dan relasi sosial di masyarakat, sehingga, dengan kata lain, agama memiliki fungsi dalam masyarakat yang berhubungan dengan relasi dan perilaku masyarakat. Macionis (Raho, 2019) mengungkapkan bahwa agama memiliki tiga fungsi, yakni menciptakan kohesi sosial, melakukan kontrol sosial, dan memberikan makna kepada manusia yang mengalami krisis dalam kehidupannya. Dengan demikian, keberadaan agama dalam masyarakat bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat serta menyediakan pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat (Sulhan & Januri, 2022).

Agama sebagai institusi sosial memainkan peran mendalam dalam kehidupan manusia, bukan hanya dalam aspek spiritual tetapi juga dalam struktur sosial yang lebih luas. Dalam teori Emile Durkheim, agama dipandang tidak saja berhubungan dengan hal-hal spiritual atau magis, tetapi memiliki peran dalam kehidupan sosial masyarakat (Siagian et al., 2023). Agama menjadi salah satu elemen yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, memengaruhi berbagai aspek, seperti politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan (Agustina, 2023). Nilai-nilai yang diusung agama kerap kali menjadi panduan dalam membentuk norma sosial dan perilaku individu, yang pada gilirannya berperan dalam menjaga keteraturan sosial serta keharmonisan dalam masyarakat. Lebih lanjut, teori

Durkheim menegaskan hal serupa, di mana agama mampu memperkuat ikatan sosial masyarakat serta mengembangkan kelompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai moral dan keyakinan kelompok tersebut (Siagian et al., 2023).

Sebagai institusi sosial, agama menetapkan serangkaian nilai dan norma yang mengatur perilaku para anggotanya. Ajaran agama mengajarkan mengenai hal-hal yang dianggap baik dan buruk serta memberikan sanksi moral terhadap pelanggaran, yang menjadikannya sebagai mekanisme pengendalian sosial. Irawan (Irawan, 2022) mencatat bahwa agama juga berfungsi sebagai pemberi pedoman hidup bagi para penganutnya. Hal ini menciptakan keseimbangan antara norma sosial dengan aturan moral agama, yang secara tidak langsung membentuk pola perilaku masyarakat yang diharapkan.

Pengaruh agama sebagai institusi sosial pun tidak hanya mencakup tatanan moral dan etika, melainkan juga menciptakan solidaritas sosial di antara para pengikutnya (Ali et al., 2015). Melalui praktik ibadah dan ritual keagamaan, individu dalam komunitas agama mengalami ikatan emosional yang kuat. Solidaritas ini menumbuhkan rasa persaudaraan, yang bukan hanya mempererat hubungan sosial, tetapi juga menciptakan identitas kolektif yang membedakan kelompok satu dengan yang lain. Identitas ini berfungsi sebagai penghubung yang membentuk kebersamaan dan memberikan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial.

Dalam kerangka ini, agama juga berperan dalam membentuk etika masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan keadilan. Ajaran agama mendorong masyarakat untuk hidup dengan sikap tanggung jawab serta kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai ini mengarahkan individu untuk berperilaku sesuai dengan harapan sosial, yang tidak hanya berpengaruh pada hubungan antarindividu tetapi juga pada tatanan sosial secara menyeluruh. Etika dan moralitas yang diusung agama, misalnya, mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan dan menjauh dari perilaku destruktif. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, muncullah pernyataan yang bersifat inklusif, yakni "semua agama mengajarkan kebaikan" (Nurhakim et al., 2024).

Di sisi lain, agama juga memberikan makna pada berbagai aspek kehidupan manusia. Ajaran agama sering kali memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Dalam kehidupan sehari-hari, agama memberikan dukungan bagi individu yang sedang menghadapi situasi sulit, memberikan mereka harapan, dan memberikan rasa aman. Makna ini memberi kekuatan emosional serta spiritual yang sangat dibutuhkan dalam situasi-situasi krisis.

Agama, selain berfungsi sebagai sumber moralitas, juga sering kali memainkan peran sosial dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat (Lumansik & Riung, 2023). Dalam teori Emile Durkheim, diungkapkan bahwa agama mampu mempererat dan memupuk rasa persaudaraan di tengah masyarakat (Siagian et al., 2023). Banyak lembaga agama menjalankan misi sosial melalui pemberian bantuan bagi yang membutuhkan, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup tetapi juga memperkuat posisi agama sebagai institusi yang peduli terhadap kesejahteraan sosial. Bantuan yang diberikan oleh institusi keagamaan ini menjadi kontribusi nyata dalam pembangunan sosial.

Namun, dalam konteks masyarakat modern, peran agama menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Munculnya gerakan-gerakan keagamaan yang mengklaim otoritas absolut terhadap kebenaran sering kali memicu konflik sosial. Di Indonesia, konflik ini sering kali berakar pada sikap fanatisme terhadap ajaran tertentu yang dianggap lebih benar daripada yang lain. Pemahaman yang eksklusif dapat menciptakan ketegangan, bahkan memicu konflik antaragama, ketika kelompok agama merasa lebih unggul atau benar.

Situasi ini memunculkan urgensi moderasi beragama sebagai upaya untuk meredam ekstremisme. Moderasi beragama bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keyakinan religius dan nilai-nilai sosial yang inklusif. Pendekatan moderasi ini berusaha mencegah fanatisme yang dapat mengancam harmoni sosial, serta mendorong pemahaman

yang lebih terbuka terhadap perbedaan. Moderasi beragama menjadi solusi untuk menciptakan keharmonisan dan toleransi di tengah masyarakat yang beragam secara religius.

Institusi agama, dalam hal ini memiliki sifat dualistik. Di satu sisi, agama mampu menjadi kekuatan pendorong bagi terciptanya kedamaian dan keharmonisan sosial. Namun, di sisi lain, agama juga dapat memicu konflik ketika pemahaman eksklusif dan radikal mendominasi pemikiran sebagian anggotanya. Karena itu, penting bagi institusi agama untuk mendorong sikap inklusif yang terbuka terhadap perbedaan, yang dapat memperkaya kehidupan sosial serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman.

Secara keseluruhan, agama sebagai institusi sosial memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kehidupan masyarakat. Ia bukan hanya menyediakan panduan moral tetapi juga bertindak sebagai pemersatu yang menguatkan solidaritas sosial. Selain itu, agama dapat menjadi katalis bagi perubahan dan perkembangan sosial. Dengan memahami peran dan tantangan agama dalam konteks sosial, diharapkan institusi agama dapat terus berkontribusi positif dalam menjaga harmoni dan stabilitas masyarakat.

Pentingnya Moderasi Beragama Sebagai Usaha Untuk Menciptakan Keharmonisan

Moderasi beragama menjadi sangat penting dalam menciptakan keharmonisan di Indonesia, sebuah negara yang kaya akan keberagaman agama, budaya, suku, dan bahasa. Sebagai bangsa dengan berbagai keyakinan, Indonesia sangat membutuhkan pendekatan moderat dalam beragama agar setiap kelompok dapat hidup berdampingan secara damai. Konsep moderasi beragama menjadi jembatan dialog yang tidak saja dilakukan untuk menjadi diskusi semata, melainkan dilakukan untuk dapat mengerti dan memahami satu sama lain sehingga hal itu mampu memperkaya pemahaman akan pluralisme di Indonesia (Kristianto & Aliano, 2024). Moderasi beragama menekankan sikap toleran, inklusif, dan terbuka terhadap perbedaan, yang pada gilirannya mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis. Keempat pilar moderasi, yakni toleransi, komitmen kebangsaan, sikap anti kekerasan, dan akomodatif dengan budaya setempat, menjadikan nilai-nilai moderasi beragama sebagai suatu konsep sosial yang penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat (Nurrohmah et al., 2022). Dengan moderasi, setiap pemeluk agama diharapkan mampu menjalankan keyakinannya tanpa mengabaikan atau merugikan hak individu lain yang berbeda pandangan atau agama. Pilar-pilar moderasi yang meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif pada budaya setempat, menjadi indikator bagi pelaksanaan moderasi beragama (Nurrohmah et al., 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama dapat menjadi pendekatan alternatif yang efektif dalam menghadapi ekstremisme dan menjadi jembatan yang menghubungkan perbedaan, baik itu perbedaan budaya maupun agama (Prakosa, 2022). Dalam situasi di mana agama digunakan untuk memobilisasi kebencian atau kekerasan, pendekatan moderasi menawarkan narasi yang menekankan pentingnya keseimbangan antara keyakinan pribadi dan tanggung jawab sosial. Hal ini mendukung pentingnya menghormati perbedaan, menghindari kekerasan, dan mempromosikan kerja sama antaragama. Dalam konteks Indonesia, di mana beragam pandangan dan keyakinan dapat dengan mudah menyebabkan ketegangan, sikap moderat menjadi sangat krusial untuk menciptakan suasana damai.

Salah satu aspek penting dari moderasi beragama adalah penekanan pada dialog antaragama dan kerja sama lintas kepercayaan. Dialog ini tidak hanya membantu pemahaman lebih dalam tentang agama lain, tetapi juga mencegah prasangka atau kesalahpahaman yang bisa menimbulkan konflik. Dengan merujuk pada salah satu fungsi agama menurut Hendropuspito (Putra, 2020) yang mengungkapkan bahwa agama juga berfungsi untuk semakin mempererat persaudaraan di tengah masyarakat, moderasi beragama menjadi konsep yang sangat penting. Dengan berpartisipasi dalam dialog dan kerja sama antarumat, masyarakat dapat belajar melihat agama lain secara objektif dan

mengembangkan sikap saling menghormati (Kristianto & Aliano, 2024). Hal ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, di mana kolaborasi antarumat beragama telah terbukti memperkuat ikatan sosial dan menciptakan suasana yang lebih harmonis di tengah perbedaan. Dengan membangun dialog antarumat beragama, masyarakat di Indonesia pemahaman tentang toleransi dan kerja sama di masyarakat akan semakin meningkat (Putra, 2020).

Moderasi beragama juga mengajak masyarakat untuk lebih terbuka dalam menafsirkan ajaran agama, khususnya dalam menghadapi tantangan sosial yang terus berkembang. Saat (Saat, 2016) mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi bukan disebabkan oleh agama itu sendiri melainkan disebabkan karena kesalahan penafsiran ajaran agama yang dibalut dengan kepentingan pribadi. Dengan pendekatan moderat, nilai-nilai agama tetap dipertahankan, tetapi pemahaman terhadapnya disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan zaman. Di Indonesia, pendekatan ini memungkinkan setiap agama tetap relevan dalam menjawab isu-isu sosial, seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial, yang semakin penting dalam kehidupan masyarakat modern. Moderasi membantu agama untuk beradaptasi dengan dinamika sosial tanpa harus mengorbankan nilai-nilai fundamentalnya.

Pemerintah Indonesia juga sangat mendukung moderasi beragama sebagai upaya menciptakan stabilitas dan keamanan nasional. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Agama, misalnya, telah menjalankan program-program moderasi untuk melawan radikalisme dan intoleransi (Saputro et al., 2024). Dengan mendorong sikap moderat dalam beragama, pemerintah berharap dapat membendung gerakan ekstremisme yang dapat merusak kerukunan dan mengancam keharmonisan masyarakat. Melalui pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai moderasi beragama, masyarakat diharapkan lebih memahami pentingnya keberagaman dan dapat hidup berdampingan dengan damai.

Selain itu, moderasi beragama membantu menguatkan jati diri Indonesia sebagai bangsa yang mengedepankan Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai persatuan di tengah keberagaman. Dalam Pancasila, nilai ketuhanan beriringan dengan kemanusiaan, keadilan, dan persatuan, yang semua ini sejalan dengan prinsip moderasi beragama. Nilai-nilai “kebhinekaan” menjadi salah satu tekanan dalam menerapkan moderasi beragama di Indonesia (Utami et al., 2023). Dengan mengadopsi pendekatan moderat, masyarakat dapat menjalankan kehidupan beragama sesuai dengan prinsip Pancasila, yang menyeimbangkan keyakinan religius dengan semangat persaudaraan dan persatuan nasional.

Pendekatan moderasi ini juga berdampak positif bagi perkembangan generasi muda Indonesia. Di era globalisasi ini, generasi muda perlu dibekali dengan pemahaman agama yang moderat agar mampu bersikap inklusif, menghargai perbedaan, dan menjadi bagian dari masyarakat yang damai. Moderasi beragama dalam pendidikan, misalnya melalui kurikulum sekolah dan kegiatan keagamaan, dapat mencegah berkembangnya paham radikal yang berpotensi merusak keharmonisan sosial. Dengan menanamkan nilai-nilai moderat sejak dini, generasi muda diharapkan menjadi penerus yang dapat mempertahankan kerukunan dan kedamaian di Indonesia.

Secara keseluruhan, moderasi beragama memiliki peran yang sangat vital dalam menciptakan dan memelihara keharmonisan di tengah masyarakat Indonesia yang beragam. Pendekatan ini bukan hanya mengajarkan sikap saling menghormati, tetapi juga memperkuat persatuan nasional, mendorong dialog lintas kepercayaan, dan menjadikan agama sebagai kekuatan positif dalam masyarakat. Dengan mempromosikan moderasi beragama, Indonesia dapat terus menjaga persatuan di tengah keberagaman, sehingga tercipta kehidupan bersama yang damai, saling menghargai, dan sejahtera.

Tantangan Moderasi Beragama di Indonesia

Moderasi beragama di Indonesia merupakan suatu pendekatan yang penting untuk menciptakan keharmonisan sosial, mengingat negara ini memiliki keragaman agama,

budaya, dan suku yang tinggi. Namun, tantangan-tantangan dalam penerapan moderasi beragama tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah munculnya radikalisme dan ekstremisme yang memanfaatkan agama sebagai alat untuk membenarkan tindakan kekerasan. Kelompok-kelompok radikal dan ekstremis ini sering kali memiliki pandangan dan pemahaman yang sempit terhadap ajaran agama dan berusaha memaksakan pandangan mereka kepada orang lain (Khoirunnissa & Syahidin, 2022). Dalam konteks ini, moderasi beragama harus berjuang melawan narasi yang memecah belah dan berpotensi memicu konflik.

Selain itu, diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok agama tertentu masih menjadi masalah di Indonesia. Dalam sebuah artikel diungkapkan bahwa angka pelajar SMA yang memiliki pandangan intoleransi aktif di Indonesia pada tahun 2023 meningkat dan lebih dari 83% pelajar menganggap bahwa ideologi Pancasila dapat diganti (Wardah, 2023). Banyak umat beragama yang mengalami marginalisasi atau penolakan dari masyarakat sekitar karena perbedaan keyakinan. Situasi ini menciptakan suasana ketegangan yang mempersulit upaya untuk mencapai moderasi beragama. Masyarakat yang terbelah oleh sikap intoleransi ini sulit untuk diajak berdialog dan berkolaborasi, sehingga menghambat terciptanya komunitas yang harmonis.

Politik identitas juga menjadi penghalang dalam upaya moderasi beragama. Dalam banyak kasus, politisi menggunakan isu-isu keagamaan untuk meraih dukungan, yang dapat memperburuk ketegangan antaragama. Kebangkitan politik identitas ini membuat masyarakat lebih terpolarisasi, sehingga menghambat dialog antarumat. Dalam arti tertentu, politik identitas tidak sepenuhnya berdampak negatif asalkan mampu mengedepankan moralitas politik (Abadi et al., 2023). Namun, kenyataan yang terjadi malah berbanding terbalik, di mana politik identitas di Indonesia lebih digunakan sebagai alat politik untuk meraih dukungan dari kelompok-kelompok tertentu demi kepentingan satu golongan. Tidak jarang, narasi-narasi yang berkaitan dengan politik identitas dilontarkan atas dasar kepentingan politik yang diselubungi dengan narasi-narasi yang bersifat agamis (Sartika & Hidayat, 2020). Hal tersebut dapat memicu gesekan-gesekan di tengah masyarakat. Bahkan, tidak jarang praktik politik identitas menjadi pemicu perpecahan dan fanatisme yang berlebihan (Abadi et al., 2023). Dalam konteks ini, moderasi beragama perlu dikembangkan sebagai alternatif yang mampu merangkul semua pihak tanpa memihak pada satu identitas tertentu.

Salah satu hambatan lain dalam penerapan moderasi beragama adalah pengaruh pemimpin agama. Pemimpin agama yang memiliki pengaruh besar di masyarakat sering kali mempertahankan pandangan konservatif atau ekstrem yang menghalangi dialog antaragama (Kurniawati & Mujahid, 2024). Dengan status mereka yang dihormati, pandangan pemimpin yang terlalu konservatif dan fanatik dapat menyebarkan dan menanamkan sikap intoleransi terhadap kelompok lain. Sikap intoleransi ini tidak hanya ditujukan kepada kelompok yang berbeda agama, tetapi juga sering muncul dalam kelompok yang seagama tetapi memiliki pandangan berbeda. Opini-opini dari pemimpin agama yang ekstrem memungkinkan adanya peningkatan sikap intoleransi, sehingga situasi ini menjadi kendala untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama. Maka dari itu, pemimpin atau tokoh agama hendaknya mampu terlibat dan memperjuangkan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap kelompok-kelompok lain yang berbeda pandangan (Kurniawati & Mujahid, 2024).

Pendidikan agama yang kurang inklusif dan tidak mendorong pemahaman kritis juga memperkuat sikap dogmatis di kalangan umat. Dalam banyak kasus, kurikulum pendidikan agama tidak memadai untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi dan pemahaman yang mendalam tentang keberagaman. Fungsi pendidikan yang dipandang sebagai pembentuk karakter peserta didik dan generasi masa depan bangsa menjadi unsur yang penting dalam penanaman nilai-nilai-nilai moderasi beragama (Hadi & Bayu, 2021). Tanpa pendidikan yang mendorong keterbukaan dan dialog, generasi muda berisiko mengadopsi pandangan

yang kaku dan intoleran, yang pada gilirannya mengancam keberlanjutan moderasi beragama di masa depan (Albana, 2023).

Selain itu, kurang kuatnya dukungan dari institusi-institusi sosial, seperti pemerintah dan organisasi masyarakat, juga menjadi faktor yang mempengaruhi pengembangan moderasi beragama di masyarakat. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk melakukan sosialisasi berkaitan dengan pentingnya moderasi beragama, upaya tersebut dinilai masih kurang maksimal. Tanpa dukungan yang kuat, upaya untuk mempromosikan moderasi beragama dapat berjalan lambat dan tidak terarah. Oleh karena itu, perlu ada kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai moderasi (Simanjuntak, 2023).

Media sosial juga dapat menjadi tantangan bagi moderasi beragama (Utami et al., 2023). Meskipun dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan moderat, media sosial sering kali menjadi sarana penyebaran informasi yang salah dan ujaran kebencian. Konten yang bersifat provokatif dan diskriminatif dapat dengan cepat viral, memicu perpecahan, dan meningkatkan ketegangan sosial. Dalam konteks ini, moderasi beragama harus mampu memanfaatkan media sosial dengan cara yang konstruktif, untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan inklusif.

Kebebasan berpendapat di Indonesia sering kali menjadi sarana untuk menyampaikan narasi-narasi yang memecah belah, baik di media sosial maupun dalam ruang publik (Sartika & Hidayat, 2020). Masyarakat cenderung lebih terfokus pada perdebatan yang bersifat adu argumen semata ketimbang membangun pemahaman yang konstruktif. Budaya ini menciptakan iklim yang tidak mendukung moderasi, di mana perbedaan dipandang sebagai ancaman, bukan sebagai peluang untuk saling belajar dan berkembang. Oleh karena itu, penting untuk mengubah budaya tersebut menjadi lebih inklusif dan produktif.

Maka dari itu, tantangan moderasi beragama di Indonesia membutuhkan perhatian dan usaha kolaboratif dari semua elemen masyarakat (Simanjuntak, 2023). Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini, termasuk reformasi pendidikan agama, penguatan dialog antaragama, dan dukungan dari berbagai pihak, moderasi beragama dapat dipromosikan secara efektif. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat terus menjaga persatuan di tengah keberagaman, sehingga tercipta kehidupan bersama yang damai, saling menghargai, dan sejahtera.

Implikasi

Tulisan ini dapat memberikan beberapa implikasi penting, baik secara teoritis maupun praktis, yang melibatkan pemahaman dan penerapan agama dalam konteks sosial. Tulisan ini dapat mendorong pengkajian ulang terhadap peran agama dalam masyarakat modern. Sebagai institusi sosial, agama tidak hanya dilihat sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai struktur yang berfungsi dalam membentuk nilai-nilai bersama. Dalam konteks moderasi beragama, penelitian ini memberikan dasar untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya mengedepankan toleransi, tetapi juga dialog lintas agama yang berbasis pada kesetaraan dan penghormatan terhadap keberagaman. Pemimpin agama memiliki peran strategis dalam menyampaikan narasi moderasi. Oleh sebab itu, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merancang pelatihan dan pendampingan kepada pemimpin agama agar mereka mampu mempromosikan nilai-nilai moderat.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi bagi penelitian selanjutnya ialah tulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengeksplorasi inisiatif pemimpin agama pada saat mempromosikan dialog lintas agama dan toleransi. Selain itu, penelitian ini juga membuka peluang untuk mengkaji lebih dalam peran pendidikan agama yang inklusif, transformasi kebijakan publik dalam mendukung nilai-nilai moderasi, serta pengaruh media sosial dalam membentuk narasi keagamaan yang lebih harmonis. Penelitian-penelitian ini diharapkan

dapat memberikan wawasan baru dan kontribusi signifikan dalam upaya memperkuat moderasi beragama di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan sosial, budaya, dan teknologi di era modern. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan moderasi beragama mampu menjadi fondasi dalam menciptakan kohesi sosial yang kuat, mendorong dialog lintas budaya dan agama, serta memitigasi potensi konflik di masyarakat yang pluralistik.

Kesimpulan

Agama sebagai institusi sosial memiliki peran yang signifikan dalam membentuk norma dan nilai yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, dalam konteks modern, agama menghadapi tantangan dari gerakan-gerakan yang bersifat ekstrem dan kaku dalam pemahaman dogmatis. Untuk menghadapi hal ini, moderasi beragama muncul sebagai pendekatan yang lebih inklusif dan relevan dengan tantangan sosial kontemporer. Penekanan moderasi beragama yang berfokus pada dialog dan usaha untuk menjembatani perbedaan menjadi sarana untuk dapat menciptakan situasi yang aman, damai, harmonis, dan kerukunan antarumat beragama. Moderasi ini berfokus pada keseimbangan antara keyakinan pribadi dan tanggung jawab sosial, serta menekankan pentingnya dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan dalam menciptakan harmoni sosial.

Namun, penerapan moderasi beragama di Indonesia menghadapi beberapa hambatan, seperti pandangan konservatif pemimpin agama, pendidikan agama yang kurang inklusif, kehadiran ruang publik dan media sosial yang dapat menjadi sarana untuk melakukan provokasi, serta kurang kuatnya dukungan institusi sosial. Tantangan-tantangan tersebut dapat ditanggulangi dengan usaha yang tekun, baik dari golongan masyarakat, pemerintah, maupun dari kalangan pemimpin agama. Oleh karena itu, diperlukan reformasi di berbagai bidang, termasuk pendidikan agama dan dialog antaragama, untuk mempromosikan nilai-nilai moderat dan menjaga kohesi sosial di tengah keberagaman masyarakat.

Referensi

- Abadi, M., Alung, C., Permadi, I., & Schova, Y. (2023). Strategi Mitigasi Dampak Negatif Politik Identitas Sebelum Dan Sesudah Pemilu. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(2), 142–165. <https://doi.org/10.46874/tkp.v4i2.721>
- Agustina. (2023). Peran Masyarakat Sosial dalam Agama Perspektif Max Weber dan Relevansinya Kemajuan Masyarakat. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(2), 189–196. <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i2.57930>
- Albana, H. (2023). Implementasi Pendidikan Moderasi Beragama di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 9(1), 49–64. <https://doi.org/10.18784/smart.v9i1.1849>
- Ali, F., Zuhdi, M., & Mudzakir. (2015). Peran Agama Dalam Perubahan Sosial Masyarakat. *Hikmah*, 2(1), 23–39. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.930>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Armawi, S. (2020). Moderasi Beragama: Pilar Utama Kekuatan Moralitas Bangsa. *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 5(2), 189–206.
- Darmalaksana, W. (2019). Cara Efektif Menyusun Proposal Penelitian Skripsi. *Jurnal Media Puslitpen UIN SGD Bandung*, 1(2), 21–26.
- Hadi, S., & Bayu, Y. (2021). Membangun Kerukunan Umat Beragama melalui Model Pembelajaran PAI Berbasis Kearifan Lokal pada Penguruan Tinggi. *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 8(1), 23–36.
- Hidayat, A., & Sugiarto, L. (2020). Strategi Penangkalan & Penanggulangan Radikalisme Melalui Cultural Reinforcement Masyarakat Jawa Tengah. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), 135–154. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2203>
- Irawan, D. (2022). Fungsi Dan Peran Agama Dalam Perubahan Sosial Individu, Masyarakat. *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 2(2), 125–135. <https://doi.org/10.37567/borneo.v2i2.1255>
- Khoirunnissa, R., & Syahidin. (2022). Urgensi Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Upaya Menangkal Radikalisme di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10(2), 177–192.
- Kristianto, D., & Aliano, Y. A. (2024). Membangun Dialog Interreligius Antarumat Beragama di Kota Malang. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 24(2), 134–145.
- Kurniawati, W., & Mujahid, K. (2024). Moderasi Beragama dalam Bingkai Antar Umat Beragama. *ANWARUL: Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 4(1), 367–382.
- Lumansik, M. E., & Riung, K. N. (2023). Agama di Tengah-tengah Pluralisme Agama (Suatu Telaah Kritis Sosiologi Agama). *Jurnal Multidisiplin Ukita*, 1(2), 59–67.
- Mudjijo, P., & Jumilah, B. S. (2016). Penggembalaan Umat Dalam Menumbuhkembangkan Iman Katolik Radikal. *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 1(2), 95–114.
- Nurhakim, N., Adriansyah, M. I., & Dewi, D. A. (2024). Intoleransi Antar Umat Beragama di Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 50–61. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.126>
- Nurrohmah, S., Aris Yusuf, M., & Aditya Putra, R. (2022). Pancasila dalam Moderasi Beragama: Membaca Ruang Media Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang. *Journal of Da'wah*, 1(2), 262–281. <https://doi.org/10.32939/jd.v1i2.2003>
- Pals, D. L. (2024). *Agama dan Kesakralan Menurut Emile Durkheim* (E. A. Iyubenu, Ed.; 1st ed.). IRCiSoD.
- Prakosa, P. (2022). Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 4(1), 45–55. <https://doi.org/10.37364/jireh.v4i1.69>
- Putra, A. (2020). Konsep Agama dalam Perspektif Max Weber. *Al-Adyan: Journal of Religious*

Studies, 1(1), 39–51.

Raho, B. (2019). *Sosiologi Agama* (1st ed.). Penerbit Ledalero.

Saat, S. (2016). Agama Sebagai Institusi (Lembaga) Sosial (Kajian Sosiologi Agama). *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, 5(2), 270.

Saputro, P. B., Wahyudi, S., & Budiyo, B. (2024). Efektivitas Program Deradikalisme Terhadap Narapidana Terorisme di Lapas High Risk Kelas II A Karanganyar. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(4), 620–535. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2010>

Sartika, A., & Hidayat, W. (2020). Intoleransi Beragama di Media Sosial : Analisis Narasi Hoaks dan Interaksi Netizen. *Omah Jurnal Uin Raden Mas Said Surakarta*, 1(1), 840–863.

Siagian, E. L., Rantung, D. A., & Naibaho, L. (2023). Analisis Teori Sosiologi Agama Emile Durkheim Terhadap Falsafah “Dalihan Natolu” dalam Budaya Batak Toba Ditinjau dari Perspektif Pendidikan Agama Kristen. *Jurnal Teologi Cultivation*, 7(2), 175.

Simanjuntak, P. (2023). Moderasi Beragama Suatu Langkah Menjaga Kebhinekaan. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 4(1), 104–116. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i1.2279>

Siswadi, G. A., Candrawan, I. B. G., & Puspawati, I. D. A. (2024). Membangun Nilai-Nilai Moderasi Beragama di Tengah Masyarakat Plural: Sebuah Pendekatan Filsafat Agama. *Widya Aksara*, 29(2), 1–13.

Sufratman, S. (2022). Relevansi Moderasi Beragama Di Tengah Masyarakat Majemuk. *Jurnal Keislaman*, 5(2), 206–217. <https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3451>

Sulhan, M., & Januri, M. R. (2022). Esensi Agama dalam Konflik Sosial di Kabupaten Poso Menggunakan Teori Karl Marx: Sebuah Literatur Review. *Acta Islamica Counsensus: Counselling Research and Applications*, 2(1), 15–28.

Utami, L. A. fadhilah, Sulistiorini, T., & Lestari, I. (2023). Analisis Pentingnya Peran Moderasi Beragama di Era Digital. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 3(2), 194. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v3i2.8021>

Wajnah. (2023). Moderasi Beragama dalam Aspek Toleransi. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10), 707–712.

Walad, M., Windayani, N. L. I., Dewi, R., Mudana, I. W., & Lasmawan, I. W. (2024). Pendekatan Pluralisme Agama dalam Pendidikan di Indonesia: Tantangan dan Strategi Implementasi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 11(3), 871–886.

Wardah, F. (2023). Setara Institute: Jumlah Pelajar yang Intoleran Aktif Meningkatkan, 83% Nilai Pancasila Bisa Diganti. *Www.Voaindonesia.Com*.

Yewangoe, A. A. (2009). *Agama dan Kerukunan* (4th ed.). Gunung Mulia.

Zandro, A. (2024). Agama sebagai Religiositas Masyarakat dalam Dunia Kehidupan Modern. *Perspektif*, 19(1), 49–65. <https://doi.org/10.69621/jpf.v19i1.215>